



Judul : Benahi sistem Pembahasan Anggaran di DPR
Tanggal : Kamis, 14 Juli 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PENCEGAHAN KORUPSI

Benahi Sistem Pembahasan Anggaran di DPR

JAKARTA, KOMPAS — Terungkapnya kasus korupsi oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendorong lembaga itu untuk mengubah sistem pembahasan anggaran. Perbaikan mekanisme pembahasan anggaran diperlukan untuk menutup celah korupsi anggota legislatif.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7), mengatakan, pekan depan, pimpinan DPR akan membicarakan perubahan sistem pembahasan anggaran. Hal ini mendesak dilakukan untuk mencegah korupsi oleh anggota DPR yang semakin sering terjadi.

Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPR dari periode ke periode terlibat sejumlah kasus korupsi. Selama periode 2014-2019 yang berlangsung hampir dua tahun, sebanyak tujuh anggota DPR tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus terbaru adalah penangkapan politisi Partai Demokrat I Putu Sudiartana pada 28 Juni lalu. Putu adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Bali yang bertugas di Komisi III yang membidangi hukum. Ia diduga mengatur proyek infrastruktur 12 ruas jalan senilai Rp 300 miliar di Sumatera Barat. Proyek yang berasal dari dana optimalisasi itu direncanakan dianggarkan tiga tahun, dimulai dari APBN-P 2016.

Sebelum Putu, KPK telah me-

netapkan enam anggota DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap dan korupsi. Mereka adalah Adriansyah (PDI-P), Patrice Rio Capella (Nasdem), Dewie Yasin Limpo (Hanura), Damayanti Wisnu Putranti (PDI-P), Budi Supriyanto (Golkar), dan Andi Taufan Tiro (Partai Amanat Nasional).

Pengawasan

Dalam waktu dekat, DPR juga akan memanggil pimpinan KPK untuk membicarakan mekanisme pengawasan terhadap proses pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR. Menurut Ade, setiap tahap pembahasan anggaran mulai dari komisi sampai Badan Anggaran perlu dicermati dan dilakukan secara transparan bagi publik dan pemantau dari KPK.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembentukan tim untuk mengobservasi tahap krusial penganggaran dan penghapusan dana optimalisasi dari APBN karena rentan disusupi proyek ijon. KPK juga mengusulkan pengawasan pembahasan anggaran di Komisi V (*Kompas*, 1/7).

Anggota Badan Anggaran Ridwan Bae mengatakan, peningkatan pengawasan rapat-rapat pembahasan anggaran di komisi dan Badan Anggaran saja tidak cukup. Pasalnya, celah permainan proyek terjadi di luar ruang rapat oleh oknum yang memanfaatkan jaringan dan koneksinya ke pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. (AGE)